

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

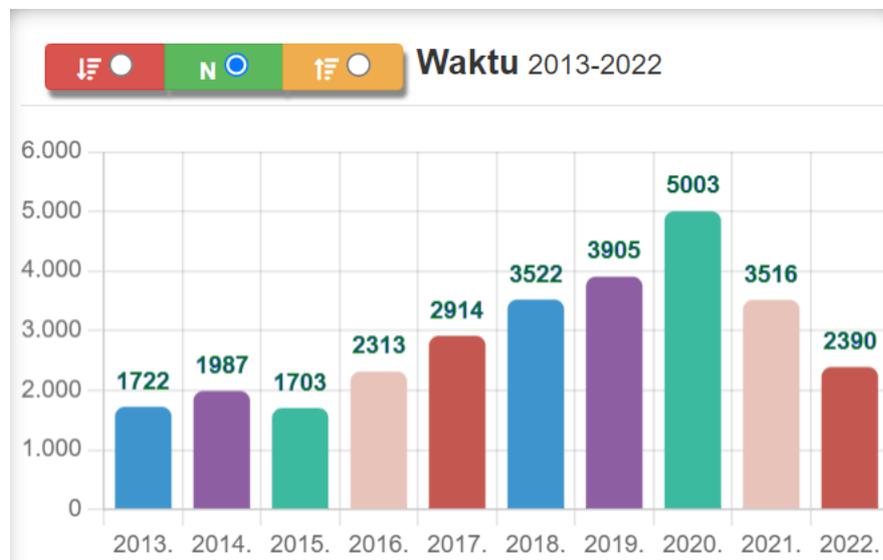
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang rawan akan bencana. Hal ini disebabkan karena secara geografis, Indonesia berada antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia dikenal juga sebagai wilayah tektonik (lempeng) aktif, hal itu disebabkan karena Indonesia berada di tiga lempeng tektonik aktif utama, yaitu “Eurasia di sebelah utara, Samudera Hindia-Australia di sebelah selatan dan lempeng Pasifik di timur.” (Kusumasari, 2014: 74). Fakta bahwa posisi Indonesia sebagai negara rawan bencana alam, seperti letak pertemuan patahan dan lempeng bumi, barisan gunung berapi aktif, negara kepulauan yang dikelilingi lautan dalam, hingga iklim tropis yang punya perubahan cuaca cukup ekstrim. Sehingga upaya penanganan dan mitigasi bencana, juga harus disosialisasi (<https://www.dayak.id/kesehatan/tips-info/sosial/2019>).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pahleviannur, 2019). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kebutuhan pembangunan yang mengharuskan banyak aktivitas eksploitasi terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap dan masalah lingkungan (Widjanarko, 2006). Melakukan alih fungsi lahan yang menyebabkan ketidak tepatan tata guna lahan sehingga mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Hal tersebut juga menjadi faktor kejadian bencana di Indonesia selalu bertambah. Jumlah kejadian bencana di Indonesia tahun 2013-2022, sebagai berikut :

Gambar 1.1

Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia 2013-2022



Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (2013-2022)

(<https://dibi.bnpb.go.id/>)

Gambar 1.1 menunjukkan data bahwa dari tahun 2013-2022 mencapai 28.975 kejadian bencana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari 2013 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020 meningkat hingga 5.003 kejadian bencana, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2021, yaitu sebesar 1.126 kejadian bencana menjadi 2.390.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka fakta inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam mengatur mengenai penanganan bencana yang berupa upaya penanganan, mencegah, peringatan awal, tanggap darurat, perbaikan, bahaya, gangguan, pemulihan, upaya meminimalisir, risiko, bantuan, tingkat kondisi darurat, pengungsian, dan korban bencana dengan organisasi yang berhubungan dengan penanganan bencana. Adanya peraturan yang berlaku mengenai penanggulangan bencana mampu memperbaiki upaya pemerintah baik dari daerah dan pusat dalam penanggulangan bencana dengan baik di Indonesia.

Terkait jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan bahwa, bencana dapat memiliki dampak yang serius dan menimbulkan kerusakan baik itu dibidang ekologi, ekonomi, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang berkaitan erat dengan manusia dan lingkungannya. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dengan cara membuat suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB sendiri merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk di tingkat pusat, sedangkan pada tiap daerah memiliki badan sendiri yang memiliki tujuan yang sama dalam penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat dengan BPBD.

Setiap bencana tentunya perlu yang namanya penanggulangan bencana agar lebih meminimalisir terjadinya bencana secara terus menerus. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko dapat menimbulkan adanya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008). Penanggulangan bencana memerlukan sebuah pengaturan tentang penataan ruang dan harus berbasis mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

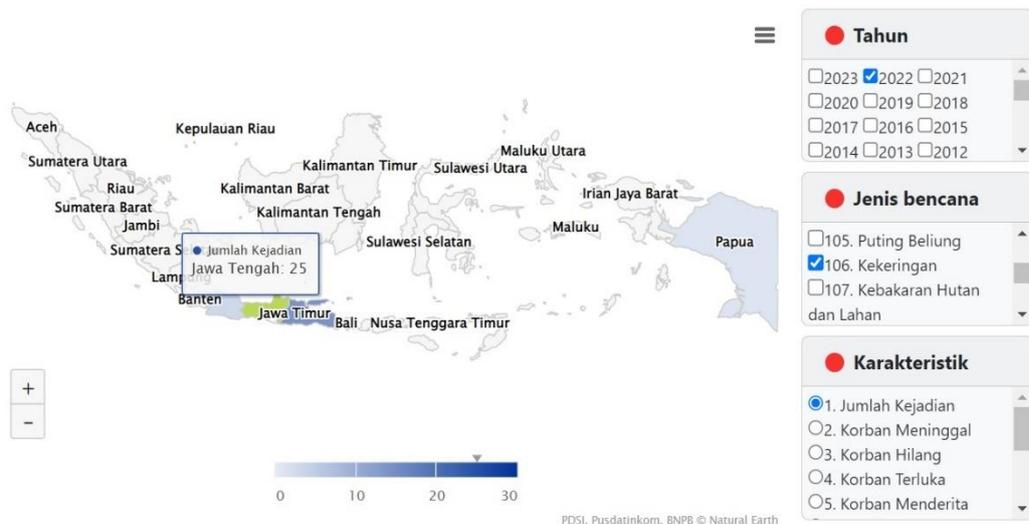
Air merupakan salah satu sumber daya dari alam yang memiliki peran fundamental untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Sebagian besar kebutuhan tubuh dan kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan air. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 1974 mengenai Pengairan menyebutkan bahwa “Air dan sumber-sumber air beserta bangunan-

bangunan pengairan harus dilindungi, dipertahankan, diamankan, dan dijaga kelestariannya agar dapat memenuhi fungsinya”.

Bencana kekeringan menyebabkan suatu daerah sulit mendapatkan air bersih. Banyak masyarakat saat ini masih bergantung pada pemanfaatan air sungai untuk keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan air sungai tersebut digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci beras, mandi, bahkan untuk memasak, dan minum. Berikut ini merupakan jumlah kejadian bencana kekeringan di Indonesia Tahun 2022 :

Gambar 1.2

Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan di Indonesia 2022



Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, 2022

(<https://dibi.bnpb.go.id/>)

Menurut gambar 1.2 dapat kita lihat bahwa di Indonesia jumlah kejadian bencana kekeringan di Provinsi Jawa Tengah termasuk tinggi sebesar 25 kejadian pada tahun 2022 dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Jawa Timur

sebesar 14 kejadian, Banten sebesar 3 kejadian, dan Papua sebesar 1 kejadian. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka BNPB Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan melakukan penyaluran air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan.

Menurut data BNPB Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam 25 kejadian bencana kekeringan tahun 2022, yaitu Kabupaten Boyolali sebesar 15 kejadian, Kabupaten Grobogan sebesar 8 kejadian dan Kabupaten Kendal sebesar 2 kejadian (Data BNPB, 2022). Berdasarkan hasil jumlah kejadian bencana kekeringan di Provinsi Jawa Tengah tersebut, Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang paling banyak terjadi kekeringan. Setiap terjadinya bencana diharapkan menjadi tanggung jawab dan perhatian seluruh masyarakat serta pemerintah. Pembentukan lembaga penanggulangan bencana juga dibentuk di tingkat daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BPBD diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana dan menyediakan perlindungan bagi warga yang membutuhkan bantuan akibat bencana.

Kabupaten Boyolali merupakan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi persediaan air tanah cukup besar, namun potensi yang besar tidak akan menjamin ketersediaan air tanah jika dalam pemanfaatannya dilakukan tidak benar dan kurang maksimal. Kabupaten Boyolali mempunyai wilayah yang kondisi fisiknya cukup bervariasi (Priyana dkk, 2013), bagian utara merupakan pegunungan Kendeng Utara, bagian timur merupakan dataran, bagian barat merupakan daerah gunung Merapi-Merbabu.

Pada bagian barat, yakni lereng gunung api Merapi-Merbabu berada di Kecamatan Selo dan Ampel, merupakan daerah vulkan yang kondisi sumber air agak kurang, pada bagian timur merupakan dataran fluvial kaki gunung api, berada di Kecamatan Banyudono, Nogosari dan Ngemplak yang merupakan daerah ketersediaan air baik. Pada daerah ini cukup banyak dijumpai mata air, dan air tanah relatif mudah didapatkan. Namun pada bagian utara seperti Kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Wonosamudro, Kemusu merupakan pegunungan yang keberadaan sumber airnya kurang baik, pada musim kemarau sering mengalami kekurangan air.

Saat ini pada Kabupaten Boyolali, wilayah yang mengalami kekeringan dan meminta bantuan air bersih bertambah dari empat kecamatan menjadi lima kecamatan pada tahun 2022. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Wonosegoro, Wonosamodro, Kemusu, Simo dan kini bertambah Tamansari (jateng.antaranews.com). Menanggapi permasalahan bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Boyolali maka pemerintah Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Boyolali telah berupaya mengatasi bencana tersebut salah satunya dengan memperhatikan mitigasi bencana yang dilakukan.

Selanjutnya beberapa upaya kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan yaitu, pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; pemantauan terhadap penggunaan teknologi

tinggi; pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan, yaitu melakukan kegiatan droping air bersih.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana kekeringan seperti penanaman pohon, konservasi air, pembuatan waduk, pemanfaatan air secara efektif dan efisien, membuat dan memperbanyak resapan air. Dalam upaya penanganannya sendiri dapat dilakukan dengan cara membuat sumur bor, droping air bersih, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, penyediaan pompa air, dan melakukan pengaturan air untuk pertanian secara darurat.

Pada kenyataannya, BPBD Kabupaten Boyolali dalam penanganan bencana kekeringan selama ini hanya berfokus dalam kegiatan droping air bersih saja, sedangkan jika hanya mengandalkan droping air bersih, tidak akan dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih saat terjadi bencana kekeringan. Berikut kegiatan droping air bersih yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali :

Gambar 1.3

Kondisi Penyaluran Air Bersih oleh BPBD Kab.Boyolali



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada kegiatan droping air bersih seperti pada Gambar 1.3 tersebut, masih terdapat permasalahan, yaitu droping air bersih dilakukan dengan tidak kondusif karena di dalam pengambilan air bersih masyarakat bebas mengambil air tanpa batasan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian air bersih, menyebabkan terjadinya kecemburuan antar masyarakat. Bencana semestinya dipersepsikan sebagai ancaman agar para pembuat kebijakan dapat memahami strategi-strategi mitigasi yang harus dipersiapkan.

Pemerintah pada musim kemarau harus mengidentifikasi wilayah yang terdampak serta mempersiapkan anggaran terlebih dahulu, ini merupakan langkah awal dalam fungsi manajemen yang terkait dengan perencanaan. Setelah itu, langkah selanjutnya pada fungsi manajemen berupa pengorganisasian di BPBD Kabupaten Boyolali melakukan pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koordinasi antar lembaga. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu penggerakan, yaitu melakukan pengarahan kegiatan oleh komando dan pelaksanaan kegiatan. Fungsi manajemen yang terakhir, yaitu pengawasan dimana BPBD Kabupaten Boyolali dalam tahap prabencana melakukan pengawasan melalui pelaporan kegiatan serta evaluasi kegiatan.

Melihat permasalahan terkait bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali dan dampak kekeringan yang semakin meningkat dengan cakupan wilayah terdampak yang semakin bertambah luas sehingga sudah semestinya pelaksanaan mitigasi bencana perlu dimaksimalkan untuk mencegah ancaman dan meminimalisir dampak risiko bencana di masa yang akan datang. Berbagai permasalahan yang ada, membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait

manajemen mitigasi bencana khususnya kekeringan. Manajemen dalam mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana serta dampak yang sulit diprediksi.

Mitigasi bencana berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen publik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali seperti hubungan kemampuan manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan keberlangsungan program atau kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali karena tidak adanya perubahan dan inovasi kegiatan penanggulangan bencana sejak bencana tersebut terjadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

BPBD Kabupaten Boyolali sendiri setiap tahunnya melakukan evaluasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil pemaparan di atas berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijelaskan sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Boyolali”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti memiliki arah yang jelas untuk mempermudah fokus jalannya penelitian dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat manajemen mitigasi bencana BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat manajemen mitigasi bencana BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan teori dan analisisnya untuk memenuhi kebutuhan penelitian khususnya mengenai manajemen mitigasi bencana yang

dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu menjadi sumber informasi dan pengetahuan terbaru dalam manajemen mitigasi bencana BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan.

2) Bagi BPBD Kabupaten Boyolali

Hasil penelitian mampu dijadikan masukan dalam menangani permasalahan bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali sehingga akan membantu dalam pemecahan masalah bencana tersebut.

3) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dalam membuat suatu karya ilmiah mengenai manajemen mitigasi bencana untuk menanggulangi bencana kekeringan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tictona, Putri, Rosyana, et al. 2020. Manajemen Bencana Tanah Longsor di Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.	Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendapatkan pengetahuan tentang cara penanggulangan dan menganalisis pendendalian bencana tanah longsing di Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian bencana dapat dimulai dengan pembentukan pemahaman dna kesadaran pada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak bencana alam, pengelolaan, sosialisasi, dan pembelajaran untuk masyakat di daerah rawan bencana	Penelitian ini memiliki kesamaan kaitannya dalam membahas tentang manajemen bencana di Jawa Tengah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam menghadapi manajemen bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang, sedangkan peneliti membahas tentang analisis manajemen mitigasi bencana serta faktor penghambat manajemen mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali khususnya pada tahap prabencana.

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2.	Dio Mahardika dan Endang Larasati. 2018. Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang	Untuk mengetahui manajemen bencana BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan banjir dan apa saja faktor penghambat dan pendukung BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan manajemen bencana banjir di Semarang	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan langkah untuk menangani bencana alam oleh BPBD diawali dengan persiapan sebelum bencana masih kurang seperti membentuk rencana kontinjensi. Saat bencana BPBD masih kekurangan persediaan kebutuhan primer	Penelitian ini memiliki banyak kesamaan dalam mengidentifikasi manajemen bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam menangani bencana. Tetapi hal yang membedakan penelitian pada jurnal ini berada di Kota Semarang dan fokusnya, yaitu dalam hal penanggulangan bencana banjir, dalam penelitian yang diambil oleh peneliti menjelaskan tentang manajemen mitigasi bencana kekeringan dalam tahap prabencana dan faktor penghambat manajemen mitigasi bencana.
3.	Muhammad Fedryansyah, Ramadhan Pancasilawan, Ishartono. 2018. Penganggulangan Bencana di Masyarakat Desa Studi di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor	Untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Diketahui bahwa terdapat peran warga meskipun warga masih belum mampu memahami dengan penuh aktifitas penanggulangan	Penelitian ini membahas mengenai perancangan program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Jatinangor, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Kabupaten Sumedang.		bencana sehingga pemerintah menyusun program yang tepat dan sesuai.	peneliti membahas tentang manajemen mitigasi pada tahap prabencana di BPBD dalam menangani bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali beserta faktor yang menjadi penghambat manajemen mitigasi bencana.
4.	Farichatun Nisa. 2014. Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang.	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen penanggulangan bencana alam oleh BPBD Kabupaten Jombang serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Jombang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui tahapan tanggap darurat, pemulihan, dan pengembangan. Tahapan yang paling dominan dilakukan oleh respon terhadap tindakan sebelum dan sesudah bencana, sedangkan penanggulangan bencana oleh masyarakat dilakukan dengan partisipasi berupa tenaga, tenaga, keterampilan, dan material, serta partisipasi sosial. Partisipasi masyarakat yang dominan adalah partisipasi tenaga kerja dan partisipasi sosial.	Adanya persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen bencana. Perbedaannya terletak pada jurnal ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Jombang, sedangkan peneliti membahas mengenai manajemen bencana pada tahap mitigasi bencana dan faktor penghambat BPBD Kabupaten Boyolali dalam penanggulangan bencana kekeringan di Boyolali.
5.	Iis Dewi Fitriani, Wandy Zulkarnaen, Agus	Penelitian ini dilakukan untuk menyusun kajian	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa usaha	Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu pada jurnal ini

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Bagianto. 2021. Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat.	mengenai penanganan letusan dan bencana alam pada Gunung Tangkuban Parahu sehingga pemerintah dan warga dapat membekali diri dengan informasi yang bermanfaat	penangana bencana di pemerintah daerah dilakukan dengan membekali diri pada ancaman bencana dan manajemen mitigasi yang baik	membahas tentang analisis manajemen mitigasi BPBD terhadap erupsi gunung tangkuban perahu di Jawa Barat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai analisis tahapan manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana kekeringan di Boyolali serta menganalisis tentang faktor penghambat manajemen mitigasi bencana.
6.	Henni Febriawati, Wulan Angraini, Sri Ekowati, Dwi Astuti. 2017. Analisis Manajemen Bencana Gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Kota Bengkulu.	Untuk mengetahui manajemen bencana di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dalam menghadapi gempa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak menjalankan manajemen bencana dengan optimal, selain itu tidak ditemukannya dokumentasi dan catatan yang berhubungan dengan mitigasi bencana dan penanggulangan bencana.	Penelitian ini membahas tentang manajemen bencana di RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu tentang menghadapi gempa bumi, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang manajemen mitigasi yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali serta faktor yang menjadi penghambat dalam

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				manajemen mitigasi bencana tersebut.
7.	Yusuf Falaq, Miftathul Rahmawati Jannah, Riska Rohmatunnisa. 2021. Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta mengenai penanganan bencana oleh BPBD Jambi dalam bencana banjir	Hasil menunjukkan bahwa tahap penanggulangan bencana yang dilaksanakan BPBD Desa Niaso Muaro Jambi dimulai dari pra bencana masih ada kekurangan bukan pembentukan rencana kontinjensi, dalam tahap <i>lackaster</i> itu ada ketentuan bencana dan anggota darurat bencana, dan tahap terakhir pascabencana masih ada kekurangan yaitu rehabilitasi yang dilakukan BPBD masih kurang tepat.	Hal yang membedakan, yaitu pada penelitian ini berfokus pada penanggulangan bencana banjir di Desa Niaso Muaro Jambi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada manajemen mitigasi bencana kekeringan membahas dan faktor penghambat manajemen mitigasi bencana kekeringan di kabupaten Boyolali.
8.	Selvia Rahmah, Ikhsan. 2022. Manajemen Bencana dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat.	Untuk melihat bagaimana penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanganan pasca bencana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada pembangunan jembatan di Desa Krueng Beukah Kecamatan Pante Ceureumen, pada tahun 2018 dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada pembangunan tanggul tebing sungai di Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meureubo, sedangkan pada tahun 2022 sekarang proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dilakukan karena mengingat	Perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada jurnal ini peneliti berfokus pada manajemen bencana dalam penanganan pascabencana yang dilakukan oleh BPBD dengan <i>locus</i> di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengidentifikasi tentang manajemen mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menangani

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			bencana yang terjadi pada tahun ini tidak perlu adanya proses rehabilitasi dan juga masalah anggaran yang menjadi kendala dalam melakukan proses penanganan pascabencana.	bencana kekeringan serta faktor yang menjadi penghambat manajemen mitigasi bencana.
9.	Widarti Gularsih Sukino, Muhammad Ahsan Samad, Nasir Mangngasing, Abdul Rivai. 2019. Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu <i>City Disaster Mitigation Management</i> .	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen mitigasi bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu serta faktor	Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa <i>Planning</i> belum maksimal, karena masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target. <i>Directing</i> belum sepenuhnya memahami Garis komando, serta masih terdapat ego sektoral sehingga proses penanganan bencana menjadi lambat. Budgeting	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus membahas tentang mitigasi bencana yang dilakukan BPBD dan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam manajemen mitigasi bencana. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada menganalisis manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD dan faktor penghambat manajemen mitigasi bencana dengan <i>locus</i> yang berbeda dengan jurnal ini. Jurnal ini <i>locusnya</i> , yaitu di Kota Palu, sedangkan peneliti di Kabupaten Boyolali.

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
10.	Syifa Nurillah, Delly Maulana, Budi Hasanah. 2022. Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan.	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bahaya banjir.	Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa prosen merencanakan penanganan bencana dengan menggunakan pendekatan pengelolaan mitigas di Kabupaten Ciwandi Sudha terlaksana meskipun belum secara maksimal.	Perbedaannya terletak pada <i>focus</i> pembahasan penelitian. Penelitian ini membahas fungsi manajemen mitigasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di Kota Cilegon Kecamatan Ciwandan, sedangkan peneliti meneliti tentang manajemen mitigasi bencana kekeringan oleh BPBD di Kabupaten Boyolali dan faktor penghambat manajemen mitigasi bencana.

1.5.2 Ilmu Administrasi Publik

Terdapat dua definisi administrasi publik yang dapat menjadi acuan oleh Dwight Waldo dalam (Maksudi, 2017:223) yaitu pertama, administrasi publik yang didefinisikan sebagai sebuah manajemen dan organisasi yang berasal dari berbagai benda, sumber daya yang dibutuhkan seperti fasilitas, modal, dan teknologi, serta manusia untuk mampu mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah. Administrasi publik juga didefinisikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan seni yang mempelajari pengaturan yang digunakan untuk mengelola berbagai urusan negara. Administrasi publik diartikan sebagai sebuah ilmu dan seni dalam pelaksanaan dan pengaturan tugas-tugas pemerintah yang dilakukan Chandler & Plano dalam (Pasolong, 2016:7).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan manajemen dalam pengelolaan organisasi manusia yang bertujuan mencapai tujuan pemerintahan, mengelola berbagai urusan, serta melayani kepentingan masyarakat. Hubungan antara administrasi publik dengan penelitian ini, yaitu manajemen mitigasi bencana merupakan bagian dari administrasi publik. Karena hal tersebut menjelaskan tentang lembaga atau organisasi yang mampu dilibatkan guna mencapai tujuan mitigasi pada tahap prabencana.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma diartikan sebagai sebuah pola pikir individu atau kelompok. Berdasarkan pendapat dari Khun dalam (Keban, 2014:3) Paradigma didefinisikan

sebagai persepsi individu terhadap sebuah metode, nilai, dan prinsip dasar untuk membuat solusi dalam sebuah permasalahan. Administrasi publik merupakan ilmu yang mengalami perkembangan sesuai dengan kendala yang dihadapinya. Paradigma administrasi publik diartikan sebagai perspektif mengenai kendala dan fungsi administrasi publik untuk menangani masalah-masalah yang ada. Administrasi publik sendiri dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Adapun paradigma administrasi publik terbagi menjadi enam dengan penjelasan sebagai berikut Frederickson (dalam Pasolong, 2019:35) :

1. Paradigma pertama yaitu birokrasi klasik

Fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur (desain) organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang menjadi lokus adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

2. Paradigma kedua yaitu birokrasi neo-klasik

Nilai yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama, tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma ini adalah “keputusan” yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah “proses pengambilan keputusan” dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi.

3. Paradigma ketiga yaitu kelembagaan

Paradigma kelembagaan fokusnya perhatian paradigma ini terletak pada pemahaman mengenai “perilaku birokrasi” yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah-masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisasi yang diungkapkan oleh paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental, yang oleh Lindblom dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan bisa dari pejabat-pejabat politis.

4. Paradigma keempat yaitu hubungan kemanusiaan

Inti yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokus dari paradigma ini adalah “dimensi-dimensi kemanusiaan” dan aspek sosial dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi.

5. Paradigma kelima yaitu pilihan publik

Fokus dari administrasi negara menurut paradigma ini tak lepas dari politik. Sedangkan fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.

6. Paradigma keenam yaitu administrasi negara baru

Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristik administrasi negara baru menurut Frederickson, menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai dan nilai-nilai sebagaimana dianut dalam berbagai paradigma tersebut di atas adalah relevan sekalipun terkadang bertentangan satu sama lain. Misalnya kemudian, penyesuaian politik dan administrasi bagaimana yang harus dilakukan untuk mendorong tercapainya nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai paradigma administrasi publik, dalam penelitian ini lebih cenderung mengarah kepada paradigma yang ke enam, yaitu administrasi negara baru, dalam paradigma tersebut meliputi usaha dalam melakukan pengorganisasian. Fokus dari administrasi negara baru dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

1.5.4 Manajemen Publik

Menurut pendapat dari James A.F. Stoner dalam (Handoko, 2008:9) mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah sebuah kesatuan yang dinamis yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, and controlling* untuk mampu meraih tujuan organisasi George R Terry dalam (Syafiie, 2006:49). Manajemen juga didefinisikan sebagai penggunaan dan *control* pada sumber daya dan aspek di dalam organisasi melalui penyusunan rencana untuk mampu meraih tujuan Prajudi dalam (Syafiie, 2006:49). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Handoko, 2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

1.5.5 Fungsi-Fungsi Manajemen

Adapun fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli antaranya : menurut George R Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10), membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk

masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan, bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dan selaras dengan standar (ukuran).

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara manajemen publik dan penelitian ini, yaitu seperti hubungan kemampuan manajer

dalam menjalankan suatu program atau kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

1.5.6 Manajemen Bencana

Manajemen bencana diartikan sebagai ilmu yang meneliti cara untuk mencegah, pengenalan dampak, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah bencana Carter dalam (Saraswati, 2018:150). Menurut (Khambali, 2017), secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk :

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia dan kerusakan baik harta benda maupun lingkungan hidup;
2. Menghilangkan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
3. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti komunikasi dan mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial di daerah yang terkena dampak bencana;
5. Mengembalikan korban bencana dari lokasi pengungsian ke daerah asal atau daerah baru yang lebih aman.
6. Meletakkan dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan.

Mekanisme manajemen bencana dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni mekanisme secara internal atau informal dan mekanisme secara eksternal atau formal. Mekanisme secara internal adalah mekanisme di mana unsur unsur masyarakat di lokasi bencana melakukan fungsi utama dalam manajemen bencana

seperti kegiatan gotong royong, sedangkan mekanisme eksternal adalah mekanisme dimana organisasi sengaja dibentuk untuk manajemen bencana (Khambali, 2017).

Menurut Nurjanah dalam (Saraswati, 2018), penyelenggaraan manajemen bencana dapat diintegrasikan ke dalam tiga tahapan siklus manajemen bencana, yang meliputi:

1. Tahap Prabencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana diklasifikasikan menjadi dua, yakni dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana di antaranya, yakni perencanaan penanggulangan, pengurangan risiko, pencegahan dan pemanduan dalam rencana pembangunan, sedangkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi akan terjadinya bencana meliputi beberapa kegiatan, yakni kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.
2. Tanggap Darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi beberapa hal di antaranya, pengkajian secara cepat terhadap lokasi dan sumber daya yang dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa hal salah satunya adalah identifikasi mengenai cakupan lokasi bencana. Selain itu, kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat serta melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Tahap Pascabencana, tahapan ini dilakukan setelah terjadinya bencana dan selesainya tahapan tanggap darurat. Kegiatan pada tahapan ini meliputi pemulihan yang bertujuan agar kebutuhan utama terpenuhi, rehabilitasi yang bertujuan membantu korban bencana untuk pulih pada kehidupan yang normal dan selanjutnya, adalah rekonstruksi yang bertujuan untuk mengembalikan situasi menjadi normal kembali serta membangun infrastruktur kembali agar menghidupkan kembali aktivitas masyarakat.

Menurut pengertian tentang bencana dan manajemen bencana di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana dapat menimbulkan dampak bagi keseimbangan ekologi, ekosistem, dan menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil yang akan berdampak langsung pada kehidupan manusia dan lingkungannya. Manajemen bencana bertujuan untuk meneliti cara untuk mencegah, pengenalan dampak, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah bencana. Analisis yang dilakukan dalam manajemen mitigasi bencana pada penelitian ini akan berpacu pada manajemen publik, yaitu berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen, khususnya pada manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

1.5.6.1 Mitigasi Bencana

Mitigasi juga dapat didefinisikan sebagai "tindakan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terhadap orang dan properti dari bahaya dan efeknya (Jane A. Bullock, George D. Haddow, 2020). Alat mitigasi dapat berupa struktural atau non struktural. Alat struktural biasanya digunakan untuk

mengendalikan bahaya, bukan untuk mencegah atau menguranginya. Alat ini kontroversial karena dapat melindungi beberapa area, tetapi dapat memberikan rasa aman yang salah, bahkan memperburuk perkembangan dan peningkatan risiko di area, yang rawan bahaya. Alat mitigasi non-struktural biasanya digunakan untuk mengurangi atau mencegah risiko dari bahaya. Mitigasi juga diartikan sebagai tindakan pengurangan bencana dengan cara membangun fisik, meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melalui bencana. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Joko, 2011:279) :

1. Pendekatan teknis dengan tujuan meminimalisir pengaruh suatu bencana.
2. Pendekatan manusia untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan bahaya bencana pada manusia
3. Pendekatan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dan pimpinan organisasi dalam pengelolaan bencana.
4. Pendekatan kultural untuk meningkatkan sedaran mengenai berbagai informasi yang perlu untuk diketahui pada sebuah bencana.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana menurut (Sang Gede Purnama, SKM, 2017), yaitu :

1. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;
2. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena pemukiman di daerah rawan bencana;

3. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul;
4. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Sebagai salah satu bagian dari pengelolaan bencana, mitigasi bencana memiliki tujuan utama sebagai pengurangan risiko terhadap bencana, adapun beberapa tujuan khusus yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan tindakan dari mitigasi bencana (Coppola, 2007), yaitu :

1. Pengurangan kemungkinan risiko bencana

Pengurangan kemungkinan risiko hanya dilakukan apabila keberadaan bahaya akan berakibat langsung kepada manusia. Tindakan ini dimungkinkan akan mengurangi besaran bahaya yang akan muncul. Namun, tindakan ini tidak akan muncul jika berasal dari bencana alam.

2. Pengurangan konsekuensi risiko

Pengurangan konsekuensi terhadap risiko bencana dengan mengasumsikan kejadian bencana akan berdampak besar bagi manusia, struktur kehidupan, dan lingkungan. Pengurangan konsekuensi risiko bencana bertujuan memastikan populasi dan lingkungan akan terlindungi tanpa adanya konsekuensi atau dampak negative dari tindakan mitigasi bencana tersebut.

3. Menghindari risiko

Tindakan mitigasi bencana yang bertujuan menghindari risiko bencana tentu tidak dapat dilakukan untuk semua jenis bencana terutama untuk

jenis bahaya yang berasal dari alam. Penghindaran risiko bencana dapat dilakukan untuk bencana yang memiliki risiko yang tidak terlalu besar atau mengganggu dan dapat diprediksi lokasi kejadian bencana.

4. Penerimaan risiko bencana

Beberapa bahaya tertentu terdapat pengelolaan bencana yang akan mempertimbangkan untuk dapat menerima suatu risiko dari bencana. Tindakan penerimaan risiko bencana memiliki dua alasan utama, yaitu (i) setiap negara, komunitas atau wilayah tertentu memiliki bahaya yang harus dihadapi dan terkadang memiliki dana terbatas untuk mengatasi risiko yang akan terjadi, sehingga pendanaan difokuskan kepada perawatan/pemulihan terhadap dampak dari risiko; (ii) beberapa tindakan pengurangan risiko akan memiliki dampak yang sebelumnya tidak diprediksi dan tidak diharapkan atau bahkan dampak dari tindakan pengelolaan bencana tersebut lebih dapat menyebabkan kerusakan dibandingkan risiko itu sendiri.

5. Berbagi/transfer dampak risiko bencana

tujuan mitigasi bencana lainnya adalah berbagai dampak risiko bencana. Tindakan mitigasi bencana ini dilakukan Ketika menyadari risiko bencana tidak dapat berkurang. Transfer dampak risiko yang umum terjadi, yaitu transfer pendanaan internasional kepada wilayah yang terdampak.

1.5.6.2 **Bencana Kekeringan**

Kekeringan merupakan bencana yang disebabkan karena faktor Adapun gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya kekeringan menurut

(Ramli, 2010:102-103), sebagai berikut :

1. Kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan.
2. Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan.
3. Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah (kandungan air di dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mitigasi dan upaya pengurangan bencana kekeringan (Ramli 2010:103), yaitu :

1. Penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan system pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengelolaan data.
2. Penyusunan PERDA untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan *historical right* dan azas keadilan.
3. Pembentukan pokja dan posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah.
4. Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan.
5. Pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan.

6. Memberikan sistem *reward* dan *punishment* bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya air dan hutan/lahan.

1.5.6.3 Faktor Penghambat Manajemen Bencana

Kelemahan dari manajemen bencana menurut penelitian *National Safety Council Carl Griffith, National Safety Council Utilities Division Manager* dalam (Ramli 2010:124-125) yang menjelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan sistem manajemen bencana di dalam suatu organisasi, yaitu :

1. Kurangnya dukungan manajemen puncak

Manajemen bencana sering hanya menjadi retorika dan tidak didukung secara politis dan teknis. Tanpa dukungan manajemen tentu program manajemen tidak akan berhasil baik.

2. Kurangnya keterlibatan dan dukungan pekerja dan masyarakat

Program manajemen bencana tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat atau anggota pekerja yang akan menjadi subyek dalam proses tanggap darurat.

3. Kurang atau tidak ada perencanaan

Manajemen bencana juga tidak dilengkapi dengan perencanaan yang baik sehingga Ketika terjadi bencana semua prosedur tidak berjalan semestinya.

4. Kurangnya pelatihan dan pendidikan

Tidak dilakukan pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk masing-masing bencana baik untuk tim penanggulangan bencana maupun untuk masyarakat yang terdampak bencana.

5. Tidak ada penanggung jawab yang ditunjukkan khusus untuk mengkoordinir sistem tanggap darurat

Penanggung jawab tidak ditunjuk dan diberi wewenang yang jelas, sehingga kesatuan komando dalam keadaan bencana tidak tercapai.

6. Sistem tanggap darurat tidak dievaluasi atau disempurnakan secara berkala
Kebiasaan yang paling buruk adalah tidak pernah melakukan evaluasi, terutama jika terjadi bencana sehingga tidak ada kemajuan dalam penanganan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

7. Sistem komunikasi dan peringatan dini tidak memadai

Sebagai akibatnya, ketika terjadi bencana semua pihak tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

8. Pekerja tidak dijelaskan mengenai tindakan atau langkah yang dilakukan jika terjadi keadaan darurat

Dengan tidak diberikan informasi inilah yang menyebabkan para pekerja tidak memiliki kemampuan dalam penanganan bencana.

1.5.6.4 Faktor Pendorong Manajemen Bencana

Manajemen bencana memang tidak mudah dan memerlukan kerja keras dan berkesinambungan menurut (Ramli, 2010:125-126) untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan dan mengembangkan manajemen bencana diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dukungan manajemen secara penuh dan konsisten yang ditunjukkan secara nyata. Manajemen bencana harus dianggap sebagai program strategis untuk memelihara dan menjaga hasil pembangunan atau proses produksi.
2. Peran serta semua pihak yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses manajemen bencana sesuai dengan porsinya masing-masing. Semakin tinggi tingkat keterlibatan, semakin tinggi keberhasilannya.
3. Ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk menangani bencana sesuai dengan kondisi dan sifat masing-masing.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Manajemen mitigasi bencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak dari bahaya yang diakibatkan suatu bencana. Bencana kekeringan merupakan bencana yang sangat merugikan bagi masyarakat yang terdampak, sehingga hal tersebut perlu diadakannya manajemen bencana kekeringan yang baik untuk meminimalisir dampak yang lebih buruk akan terjadi. Fenomena yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen, dapat dilihat melalui 4 (empat) fenomena :

- 1) Perencanaan dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali oleh BPBD Kabupaten Boyolali, yaitu :
 1. Analisis dan identifikasi wilayah
 2. Tentukan skala prioritas
 3. Kembangkan rencana kerja operasional

4. Penganggaran
- 2) Pengorganisasian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam penanggulangan bencana, yaitu :
 1. Pembagian kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing
 2. Koordinasi antar lembaga
- 3) Penggerakan upaya-upaya atau tindakan yang dilakukan dalam mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali oleh BPBD Kabupaten Boyolali, yaitu :
 1. Pengarahan kegiatan oleh komando
 2. Pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana
- 4) Pengawasan dalam pelaksanaan program atau kegiatan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali oleh BPBD Kabupaten Boyolali, yaitu :
 1. Pelaporan kegiatan
 2. Evaluasi kegiatan

1.7 Argumen Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki tingkat kejadian bencana tertinggi di Indonesia. Beberapa jenis kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah salah satunya, yaitu bencana kekeringan. Bencana kekeringan di Jawa Tengah, tertinggi yaitu berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali menjadi salah satu kabupaten yang terdampak bencana kekeringan tertinggi dibandingkan daerah lain. Kekeringan di Kabupaten Boyolali menjadi bencana yang terus berulang dan hampir terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali. Menanggapi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya

manajemen mitigasi bencana yang baik khususnya dalam menanggulangi dampak akibat bencana kekeringan seperti kekurangan air bersih serta melakukan analisis terkait faktor penghambat manajemen mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah berupa pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah berdasarkan pada fenomena kenyataan yang terjadi di lapangan. Menurut (Sugiyono, 2013:15) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang dilandaskan dengan filsafat *post-positivisme* di mana data dianalisis dari hasil perolehan kemampuan penalaran penelitian yang menghubungkan data, informasi, fakta, dan diinterpretasikan berdasarkan perumusan masalah. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam penanggulangan bencana kekeringan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini telah sejalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokus pelaksanaan dilakukannya penelitian. Lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah pada Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh

BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi kekeringan di Boyolali maka penelitian ini dilakukan pada BPBD Kabupaten Boyolali yang bertempat di Jalan Boyolali-Solo Km. 2, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Peneliti telah memilih beberapa narasumber yang akan dijadikan informan dengan menggunakan dua teknik. Teknik pertama yang dipakai yaitu *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2017:85) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu Kepala Bidang I Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Boyolali.

Teknik kedua terkait manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali menggunakan teknik *accidental sampling*. Menurut (Sugiyono, 2013:85) *accidental sampling* adalah teknik dengan proses pengambilan responden untuk dijadikan sampel yang kebetulan ditemui dengan peneliti, yang dirasa cocok sebagai sumber data. Teknik kedua ini yang digunakan yaitu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data lain, yaitu sumber tertulis seperti dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh data sekunder.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui narasumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada. Sumber data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian dan observasi.
2. Data sekunder ini merupakan data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya. Data sekunder dimanfaatkan sebagai data pendukung penelitian yang didapatkan melalui berbagai sumber yang sebelumnya telah ada, seperti laporan penelitian, karya tulis yang dipublikasikan dan data-data statistik.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2015:137) menjelaskan bahwa Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa sumber dan berbagai cara. Berikut macam-macam cara pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Ini merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melihat gejala-gejala yang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses di mana untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian, peneliti melakukan tanya jawab kepada informan baik beratatap muka maupun tidak bertatap muka sehingga data yang diperlukan dapat terpenuhi dan dapat menjawab permasalahan. Pihak yang akan diwawancara yaitu Kepala Seksi Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Boyolali dan masyarakat yang terdampak kekeringan.

3. Dokumentasi/Literatur

Dokumentasi atau literatur merupakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dimaksud yakni dokumen yang berkaitan tentang manajemen mitigasi bencana khususnya pada BPBD.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2013:246) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktifitas dalam proses analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting, mentranskrip data dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat dihasilkan data atau kesimpulan yang *focus* dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan memilih data

yang akan diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Boyolali dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Boyolali.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data mempermudah peneliti untuk mempelajari, memahami dan melihat bagaimana informasi yang diberikan akan menghasilkan data kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan melalui susunan kalimat yang bersifat naratif, gambar dan table sebagai pendukung data penelitian sehingga data akan lebih mudah untuk dipahami terkait dengan manajemen mitigasi bencana.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Tahap selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan, penelitian akan diverifikasi karena kesimpulan awal masih bersifat sementara sehingga diperlukan adanya analisis terhadap pola, konsep, dan hubungan dengan yang dituangkan dalam tulisan. Setelah semuanya disajikan maka apa yang menjadi objek penelitian akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan memungkinkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data berarti data yang tersimpan nilainya adalah benar atau tidak ada unsur keliru dan harus menyampaikan pesan yang benar tanpa menyesatkan. Menurut (Moleong, 2007:330-331) mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber memiliki arti mengecek dan membandingkan Kembali derajat kepercayaan suatu

informasi yang didapatkan dengan memakai waktu dan alat yang berbeda, yang bisa dilakukan dengan :

- 1) Melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- 2) Melakukan perbandingan terkait apa yang diucapkan orang di depan umum dengan napa yang diucapkan secara pribadi;
- 3) Melakukan perbandingan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan napa yang dikatakan sepanjang waktu;
- 4) Melakukan perbandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.